

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jendral Pajak. 2017, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tanggal 2 November 2017 tentang Tata Cara Penlitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan.*
- Direktur Jendral Pajak. 2017, *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-40/PJ/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penlitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan.*
- Kemenkeu. 2019. *APBN 2019*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019> diakses pada 10 Maret 2019.
- Republik Indonesia. 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.*
- Republik Indonesia. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.*
- Republik Indonesia. 2016, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan.*
- Republik Indonesia. 2017, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan*
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.